

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul K. 2002. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Rineke Cipta. Jakarta.

Abdul rahmat. 2003. *Efektivitas Implementasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.

Agus Dwiyanto. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.

Burhan Asshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Durocher, Joseph F, 2001. *Succesfull Restaurant Design*. John willey & Sonc, Canada.

Gibson JL. 2001. *Organisasi (Terjemahan Agus Dharma)*. Erlangga, Jakarta

Gusti Bagus Rai Utama, 2007, *Pemasaran Pariwisata*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung.



ndi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bayumedia akti Group, Malang.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia, Jakarta.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Sinambela. Lijan Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi)*. Bumi Aksara, Jakarta.

Siti Nurhayati, 2012. *Metodeologi Penelitian Praktis*. Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, Pekalongan.

Sondang P. Siagian. 2002. *Kiat meningkatkan Produktivitas Kerja*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soetiono, 2002. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.

Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Ubhara Press, Surabaya.

JURNAL

Ahmad A. Tufail (dkk) "Analisis Karakteristik Lokasi Warung Kopi di Kota Makassar" Jurnal WKM, Vol. 10, No. 2, 2022.

Arini Nur Annisa (dkk), *Government Supervision of The Rights Fulfillment of oused Workers In The Transition Period*, Awang Long Law eview, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.



Eka Merdekawati Djafar, "SINERGI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 3, Nomor 3.

Ida Hayu Dwimayanti, *Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah)*. "Dialogue" JIAKP, Vol. 1 No. 1 Tahun 2004.

Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, dan Romula Adiono, "*Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu*", Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 1, Nomor 1.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dkk, "*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 4
<https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no>

Takariadinda Diana Ethika, "*Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Di Kabupaten Sleman*" Jurnal Kajian Hukum , Vol. 1, No. 2, 2016.

Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, dan Siti Rochmah, "*Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal*" Jurnal Wacana Vol. 16, Nomor 4, 2013. Hlm. 180

Yusuf Ongkohadi, "Perancangan Interior Magnum Kafe di Surabaya", Jurnal Intra. Vol 2, Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan Gedung.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.



Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

MEDIA

Bugis Pos. Hanggar Tallasapang di Tutup Tanpa IMB. Sumber: <https://bugispos.com/2022/06/30/ballasaki-hanggar-talasalapang-ditutup-tanpa-imb-diberi-waktu-seminggu-urus-perizinan/>. Diakses pada 8 April 2023.

Kedai Berita. Cafe di Area Sempadan Pantai Angin Mammiri. Sumber: <https://kedai-berita.com/2021/07/28/komisi-c-terusik-ada-kafe-di-area-sempadan-pantai-anging-mammiri/>. Diakses pada 8 April 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sumber: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7995517/pemerintah-kota-makassar/izin-mendirikan-bangunan-imb>, Diakses pada 1 April 2023



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171
Website : www.dpmtsp.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 734/DPMTSP/800.2/VII/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR INTAN ABDULLAH, S.E., M.M.
NIP : 197007302001122001
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURZAKIAH
NIM/Jurusan : B021191090 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Jenis Penelitian : Skripsi

Benar telah Melakukan Penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mulai tanggal 21 Juni s/d 21 September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juli 2023

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


NUR INTAN ABDULLAH, S.E., M.M.
Pembina, IV/a
197007302001122001

